

RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Tahun 2024-2026 dan program, kegiatan, dan sub kegiatan Bapenda Tahun 2024. Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan kebutuhan kinerja yang dilaksanakan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.

Semoga Renja Bapenda Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2024 dalam memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut agar mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN



DR. H. REZA FAISAL SALEH, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I/ IV.b

Nip: 19820306 200012 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	29
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..	38
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5. Penelaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	55
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	56
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	57
3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	60
BAB V PENUTUP	76
5.1. Catatan Penting	76
5.2. Kaidah Pelaksanaan	77
5.3. Rencana Tindak Lanjut	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapenda dan Pencapaian Renstra Bapenda Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan.....	11
Tabel 2	Target dan Realisasi APBD Pendapatan Daerah TA. 2022-2023	32
Tabel 3	Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	36
Tabel 4	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	42
Tabel 5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	55
Tabel 6	Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	58
Tabel 7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Mau Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsis, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukann terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 9Renja) Perangkat Daerah.

Renja Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untu periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Bapenda itu sendiri. Penyusunan Rancangan awal Renja tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, hasil evaluasi renja Bapenda tahun lalu, dan hasul evaluasi renja tahun berjalan.

Dengan berpedoman pada Renstra, yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatn, lokasi kegiatan, kelompok

sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi Pencapaian sasaran Renstra Bapenda.

Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Persiapan penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Bapenda tentang pembentukan tim penyusun Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
- b. Orientasi mengenai Renja Bapenda;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2024 mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Bapenda;
- b. Hasil evaluasi Renja Bapenda tahun lalu.

Hasil perumusan Rancangan Awal Renja Tahun 2024 disajikan dengan sistematika:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renda Bapenda;
- c. Tujuan dan Sasaran Bapenda;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda;
- e. Penutup.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
 9. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301)
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
23. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, yaitu:

1. Menganalisis gambaran pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Menelaah hasil evaluasi Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menelaah tujuan dan sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Merumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka

penyusunan Rencana Kerja Badan Pendaptan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dilaksanakan menurut sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

1.3 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

- Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023);
- Menjelaskan pencapaian target Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun-tahun sebelumnya;
- Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun lalu, dan realisasi Renstar Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada

hasil laporan kinerja tahunan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan/ atau realisasi APBD;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Berisi uraian mengenai perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan subkegiatan, dan penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB V. PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari suatu perencanaan yang baik yang bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tersebut hanya dapat diperoleh melalui suatu evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun lalu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Secara umum Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 mengacu pada rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja Renstra Bapenda ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Bapenda dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subb kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Bapenda, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan yang akan ditempuh, maka harus menggunakan strategi dan cara yang disusun secara sistematis, jelas, dan terukur dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan waktu yang akan dipergunakan. Hal ini sangat penting dalam penentuan penetapan indikator dan target kerja dalam proses penyusunan rencana kerja (RENJA) dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 serta penyusunan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jumlah alokasi anggaran dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

Gambaran terhadap review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan sampai dengan bulan September dapat dilihat pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Bapenda
dan Pencapaian RENSTRA Bapenda Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
KEUANGAN																							
Badan Pendapatan Daerah																							
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu di bidang pendapatan PAD	%	100,0	5.865.173.2 70,22	100,0	662.241.6 00,0	100,0	2.210.859.7 06,22	846.392.9 00,0	25,0	26.394.00 0,0	25,0	100.319.5 85,0	25,0	110.319.5 85,0	75,0	110.319.5 85,0	75, 0	13, 03	75,0	772.561.1 85,0	75, 0	13, 17
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan laporan hasil koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah bidang pendapatan daerah	%	100,0	3.853.699.2 77,70	100,0	0,0	100,0	1.452.640.5 37,70	445.071.5 00,0	25,0	11.794.00 0,0	25,0	39.332.18 5,0	25,0	44.332.18 5,0	75,0	44.332.18 5,0	75, 0	9,9 6	175,0	44.332.18 5,0	17 5,0	1,1 5
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokum en	3,0	477.580.59 0,0	0,0	36.990.50 0,0	1,0	180.022.590 ,0	6.348.000, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.990.50 0,0	0,0	7,7 5
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokum en	3,0	273.949.42 5,0	0,0	39.783.50 0,0	1,0	103.264.425 ,0	7.698.700, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.783.50 0,0	0,0	14, 52
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokum en	3,0	1.293.772.5 88,20	0,0	45.819.30 0,0	1,0	487.683.748 ,20	21.704.30 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.819.30 0,0	0,0	3,5 4
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokum en	3,0	81.837.345, 0	0,0	17.087.50 0,0	1,0	30.848.345, 0	22.129.00 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.087.50 0,0	0,0	20, 88

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%	
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokum en	3,0	96.017.520, 0	0,0	13.786.00 0,0	1,0	36.193.520, 0	5.458.000, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.786.00 0,0	0,0	14, 36
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokum en	3,0	87.974.062, 50	0,0	26.250.00 0,0	1,0	33.161.562, 50	6.406.200, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.250.00 0,0	0,0	29, 84
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokum en	6,0	225.301.25 9,0	0,0	0,0	1,0	35.705.459, 0	60.374.50 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokum en	3,0	400.000.00 0,0	0,0	22.648.90 0,0	0,0	200.000.000 ,0	38.395.10 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.648.90 0,0	0,0	5,6 6
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokum en	3,0	917.266.48 8,0	0,0	379.654.8 00,0	1,0	345.760.888 ,0	276.557.7 00,0	0,0	11.794.00 0,0	0,0	39.332.18 5,0	0,0	44.332.18 5,0	0,0	44.332.18 5,0	0,0	16, 03	0,0	423.986.9 85,0	0,0	46, 22
Predikat Kinerja																							
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	cakupan hasil koordinasi dan pelaporan bidang pendapatan dengan bidang terkait	%	100,0	2.011.473.9 92,52	100,0	0,0	100,0	758.219.168 ,52	401.321.4 00,0	25,0	14.600.00 0,0	25,0	60.987.40 0,0	25,0	65.987.40 0,0	75,0	65.987.40 0,0	75, 0	16, 44	175,0	65.987.40 0,0	17 5,0	3,2 8
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	36,0	1.599.481.7 27,52	0,0	0,0	12,0	602.919.903 ,52	393.416.7 00,0	3,0	14.600.00 0,0	0,0	60.987.40 0,0	0,0	65.987.40 0,0	3,0	65.987.40 0,0	25, 0	16, 77	3,0	65.987.40 0,0	8,3 3	4,1 3
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokum en	6,0	411.992.26 5,0	0,0	80.221.10 0,0	2,0	155.299.265 ,0	7.904.700, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.221.10 0,0	0,0	19, 47

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
										I		II		III									
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%	
Predikat Kinerja																							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentasi Peningkatan PAD	%	5,0	55.677.970. 574,09	0,0	31.344.75 0.000,0	5,0	17.906.726. 564,09	18.646.81 0.680,0	0,0	566.355.3 29,0	0,0	3.077.966 .081,0	0,0	5.111.993. 154,0	0,0	5.111.993. 154,0	0,0	27, 41	0,0	36.456.74 3.154,0	0,0	65, 48
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan laporan pengelolaan pendapatan daerah	%	100,0	55.677.970. 574,09	100,0	0,0	100,0	17.906.726. 564,09	18.646.81 0.680,0	25,0	566.355.3 29,0	25,0	3.077.966 .081,0	25,0	5.111.993. 154,0	75,0	5.111.993. 154,0	75, 0	27, 41	175,0	5.111.993. 154,0	17 5,0	9,1 8
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokum en	12,0	1.986.650.6 43,0	0,0	0,0	4,0	599.115.043 ,0	759.499.5 00,0	0,0	27.553.03 9,0	0,0	56.067.87 2,0	0,0	68.417.87 2,0	0,0	68.417.87 2,0	0,0	9,0 1	0,0	68.417.87 2,0	0,0	3,4 4
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokum en	15,0	654.438.93 5,0	0,0	198.350.5 00,0	6,0	290.440.535 ,0	122.971.8 00,0	0,0	0,0	0,0	6.423.000 ,0	0,0	12.846.00 0,0	0,0	12.846.00 0,0	0,0	10, 45	0,0	211.196.5 00,0	0,0	32, 27
Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	0,0	0,0	0,0	255.179.5 00,0	1,0	0,0	82.562.30 0,0	0,0	0,0	0,0	1.290.600 ,0	0,0	1.290.600, 0	0,0	1.290.600, 0	0,0	1,5 6	0,0	256.470.1 00,0	0,0	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasara na	150,0		0,0		50,0			3,0		0,0		0,0		3,0		6,0		3,0		2,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasara n	36,0		0,0		30,0			3,0		0,0		0,0		3,0		10, 0		3,0		8,3 3	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasara na	36,0		0,0		30,0			3,0		0,0		0,0		3,0		10, 0		3,0		8,3 3	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasara na	36,0		0,0		30,0			3,0		0,0		0,0		3,0		10, 0		3,0		8,3 3	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasara na	36,0	39.769.030. 465,65	0,0	0,0	30,0	13.219.339. 533,65	12.267.75 8.080,0	3,0	488.142.2 90,0	0,0	2.414.583 .758,0	0,0	3.679.605. 678,0	3,0	3.679.605. 678,0	10, 0	29, 99	3,0	3.679.605. 678,0	8,3 3	9,2 5
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasara na	36,0		0,0		40,0			3,0		0,0		0,0		3,0		7,5 0		3,0		8,3 3	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasara na	36,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasara na	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan	30,0		0,0		30,0			3,0		0,0		0,0		3,0		10, 0		3,0		10, 0	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%	
		Prasara na																					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			7,0		0,0		0,0		7,0		23,33		7,0		7,78	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			7,0		0,0		0,0		7,0		23,33		7,0		7,78	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			7,0		0,0		0,0		7,0		23,33		7,0		7,78	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			7,0		0,0		0,0		7,0		23,33		7,0		7,78	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	105,0		0,0		35,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	120,0		0,0		40,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	105,0		0,0		35,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	120,0		0,0		40,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/8*100%	
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/8*100%	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	105,0		0,0		35,0			3,0		0,0		0,0		3,0		8,57		3,0		2,86	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	120,0		0,0		40,0			3,0		0,0		0,0		3,0		7,50		3,0		2,50	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	90,0		0,0		30,0			3,0		0,0		0,0		3,0		10,0		3,0		3,33	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	150,0		0,0		50,0			12,0		0,0		0,0		12,0		24,0		12,0		8,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	120,0		0,0		40,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	21.315,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75,0		3,0		0,01	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	10.246,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75,0		3,0		0,03	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	15.780,0	4.044.760.600,0	0,0	0,0	4,0	739.923.400,0	808.000.800,0	1,0	3.510.000,0	1,0	33.870.000,0	1,0	99.310.000,0	3,0	99.310.000,0	75,0	12,29	3,0	99.310.000,0	0,02	24,6
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	8.930,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75,0		3,0		0,03	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	18.889,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75,0		3,0		0,02	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/8*100%	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	19.887, 0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 2	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	29.442, 0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 1	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	21.828, 0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 1	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	33.246, 0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 1	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2.656,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,1 1	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	23.979, 0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 1	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	9.270,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 3	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2.850,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,1 1	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	3.377,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 9	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/8*100%	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	21.117, 0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 1	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	22.570, 0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 1	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	5.342,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 6	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	15.620, 0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 2	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	6.143,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 5	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	15.582, 0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 2	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	21.841, 0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 1	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	21.000, 0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 1	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4.710,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 6	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	11.268, 0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0 3	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2.271,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,1 3	
Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	6,0	516.397.51 5,0	0,0	0,0	4,0	194.654.515 ,0	676.532.6 00,0	1,0	20.000.00 0,0	1,0	117.389.1 31,0	1,0	246.054.1 31,0	3,0	246.054.1 31,0	75, 0	36, 37	3,0	246.054.1 31,0	50, 0	47, 65
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Keteta p an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Keteta p an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Keteta p an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Keteta p an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Keteta p an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Keteta p an	0,0	1.713.838.7 00,0	0,0	0,0	4,0	856.919.350 ,0	826.612.7 00,0	0,0	0,0	0,0	19.900.00 0,0	0,0	47.733.90 0,0	0,0	47.733.90 0,0	0,0	5,7 7	0,0	47.733.90 0,0	0,0	2,7 9
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Keteta p an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Keteta p an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Keteta p an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Keteta p an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Keteta p an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/8*100%	
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			1,0		1,0		1,0		3,0		75, 0		3,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en Ketetap an	0,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Laporan	36,0	1.577.646.6 65,52	0,0	0,0	12,0	594.689.241 ,52	299.086.4 00,0	3,0	12.150.00 0,0	0,0	54.106.47 0,0	0,0	128.104.7 23,0	3,0	128.104.7 23,0	25, 0	42, 63	3,0	128.104.7 23,0	8,3 3	8,1 2

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/8*100%	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan	12,0	476.121,00 3,0	0,0	0,0	4,0	179.472.403 ,0	425.464,0 00,0	1,0	5.000.000 ,0	0,0	24.145,25 0,0	0,0	29.145,25 0,0	1,0	29.145,25 0,0	25, 0	6,8 5	1,0	29.145,25 0,0	8,3 3	6,1 2
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	2.698,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	4.566,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	2.116,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	414,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	1.195,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	2.267,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	2.413,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	2.750,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	2.266,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	2.577,0	3.558.134,2 50,0	0,0	1.225.452. 200,0	4,0	711.626.850 ,0	1.972.520. 400,0	0,0	0,0	0,0	286.250,0 00,0	0,0	686.500,0 00,0	0,0	686.500,0 00,0	0,0	34, 80	0,0	1.911.952. 200,0	0,0	53, 73
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	1.682,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	2.274,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	1.709,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	750,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	2.016,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	450,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	1.571,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	455,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD	2.622,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%	
	Jumlah Dokumen Tertungginya WP yang Memiliki Piutang Pajak Jumlah Dokumen Tertungginya WP yang Memiliki Piutang Pajak Jumlah Dokumen Tertungginya WP yang Memiliki Piutang Pajak Jumlah Dokumen Tertungginya WP yang Memiliki Piutang Pajak Jumlah Dokumen Tertungginya WP yang Memiliki Piutang Pajak Jumlah Dokumen Tertungginya WP yang Memiliki Piutang Pajak Jumlah Dokumen Tertungginya WP yang Memiliki Piutang Pajak Jumlah Dokumen Tertungginya WP yang Memiliki Piutang Pajak Jumlah Dokumen Tertungginya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokum en SSPD Dokum en SSPD Dokum en SSPD Dokum en SSPD Dokum en SSPD Dokum en SSPD Dokum en SSPD Dokum en SSPD Dokum en SSPD Dokum en SSPD	2.403,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
			741,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
			1.471,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
			1.350,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
			1.334,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
			950,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Laporan	3,0	598.734.17 5,50	0,0	16.501.00 0,0	1,0	225.691.075 ,50	94.150.60 0,0	0,0	5.000.000 ,0	0,0	23.540.00 0,0	0,0	35.110.00 0,0	0,0	35.110.00 0,0	37, 29	0,0	51.611.00 0,0	0,0	8,6 2	
Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	300,0	458.510.30 7,42	0,0	0,0	4,0	172.834.103 ,42	225.095.7 00,0	25,0	5.000.000 ,0	0,0	25.930.00 0,0	0,0	57.705.00 0,0	25,0	57.705.00 0,0	62 5,0	25, 64	25,0	57.705.00 0,0	8,3 3	12, 59
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	90,0	323.707.31 4,0	0,0	238.414.0 00,0	4,0	122.020.514 ,0	86.555.80 0,0	0,0	0,0	0,0	14.470.00 0,0	0,0	20.170.00 0,0	0,0	20.170.00 0,0	0,0	23, 30	0,0	258.584.0 00,0	0,0	79, 88
Predikat Kinerja																							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100,0		100,0		100,0			25,0		25,0		25,0		75,0		75, 0		75,0		75, 0	
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100,0	445.265.60 8.539,66	100,0	148.221.0 70.675,0	100,0	166.174.503 ,145,659	176.574.3 76.800,0	25,0	46.659.70 3.375,0	25,0	86.568.44 9.321,0	25,0	122.127.6 28.927,0	75,0	122.127.6 28.927,0	75, 0	69, 16	75,0	270.348.6 99.602,0	75, 0	60, 72
	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	0,50		0,0		0,50			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Bapenda	%	100,0	3.561.526.2 52,56	100,0	0,0	100,0	1.342.506.7 80,56	1.032.907. 300,0	25,0	15.000.00 0,0	25,0	55.173.04 8,0	25,0	92.771.94 4,0	75,0	92.771.94 4,0	75, 0	8,9 8	175,0	92.771.94 4,0	17 5,0	2,6 0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	7,0	806.610.44 3,52	0,0	104.250.0 00,0	2,0	304.049.419 ,52	287.521.9 00,0	0,0	5.000.000 ,0	0,0	24.024.04 8,0	0,0	44.305.14 4,0	0,0	44.305.14 4,0	0,0	15, 41	0,0	148.555.1 44,0	0,0	18, 42

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokum en	3,0	670.618.79 3,52	0,0	0,0	1,0	252.787.769 ,52	246.679.5 00,0	0,0	5.000.000 ,0	0,0	16.149.00 0,0	0,0	23.568.00 0,0	0,0	23.568.00 0,0	0,0	9,5 5	0,0	23.568.00 0,0	0,0	3,5 1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokume n	3,0	395.142.97 5,0	0,0	129.655.0 00,0	1,0	148.947.975 ,0	71.774.50 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.913.800, 0	0,0	1.913.800, 0	0,0	2,6 7	0,0	131.568.8 00,0	0,0	33, 30
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokum en	3,0	716.874.85 5,0	0,0	103.605.5 00,0	1,0	270.223.855 ,0	43.316.00 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	103.605.5 00,0	0,0	14, 45
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokum en	3,0	674.620.02 0,0	0,0	103.327.0 00,0	1,0	254.296.020 ,0	111.465.4 00,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.985.000, 0	0,0	2.985.000, 0	0,0	2,6 8	0,0	106.312.0 00,0	0,0	15, 76
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun/Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokum en	3,0	184.384.04 3,52	0,0	44.860.00 0,0	1,0	69.503.019, 52	58.200.00 0,0	0,0	5.000.000 ,0	0,0	15.000.00 0,0	0,0	20.000.00 0,0	0,0	20.000.00 0,0	0,0	34, 36	0,0	64.860.00 0,0	0,0	35, 18
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12,0	113.275.12 2,0	0,0	26.750.00 0,0	4,0	42.698.722, 0	213.950.0 00,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	26.750.00 0,0	0,0	23, 62
Predikat Kinerja																							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	%	100,0	381.786.79 8.474,24	100,0	0,0	100,0	143.913.403 ,786,24	146.641.6 08.594,0	25,0	44.191.97 8.108,0	25,0	80.779.64 8.563,0	25,0	110.073.4 24.594,0	75,0	110.073.4 24.594,0	75, 0	75, 06	175,0	110.073.4 24.594,0	17 5,0	28, 83
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	36,0	378.490.68 5.845,80	0,0	122.513.0 48.352,0	484,0	142.670.943 ,885,80	145.819.3 47.894,0	0,0	44.162.97 8.108,0	0,0	80.687.71 3.503,0	0,0	109.871.6 33.434,0	0,0	109.871.6 33.434,0	0,0	75, 35	0,0	232.384.6 81.786,0	0,0	61, 40

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
										I		II		III									
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	36,0	254.843.543,52	0,0	200.849.500,0	12,0	96.062.519,52	42.840.000,0	0,0	5.000.000,0	0,0	15.000.000,0	0,0	20.000.000,0	0,0	20.000.000,0	0,0	46,69	0,0	220.849.500,0	0,0	86,66
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36,0	1.451.640.18,56	0,0	443.112.300,0	12,0	547.191.446,56	360.185.500,0	0,0	10.000.000,0	0,0	34.935.060,0	0,0	88.516.160,0	0,0	88.516.160,0	0,0	24,58	0,0	531.628.460,0	0,0	36,62
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	36,0	507.505.853,52	0,0	51.000.000,0	12,0	191.302.829,52	92.342.000,0	0,0	5.000.000,0	0,0	15.000.000,0	0,0	20.000.000,0	0,0	20.000.000,0	0,0	21,66	0,0	71.000.000,0	0,0	13,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3,0	141.638.040,0	0,0	40.465.000,0	1,0	53.390.040,0	10.896.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.465.000,0	0,0	28,57
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	9,0	435.982.212,84	0,0	421.999.000,0	1,0	164.342.204,84	168.603.400,0	0,0	5.000.000,0	0,0	15.000.000,0	0,0	45.240.000,0	0,0	45.240.000,0	0,0	26,83	0,0	467.239.000,0	0,0	107,17
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	36,0	481.500.000,0	0,0	61.870.000,0	12,0	181.500.000,0	144.128.000,0	0,0	4.000.000,0	0,0	12.000.000,0	0,0	28.035.000,0	0,0	28.035.000,0	0,0	19,45	0,0	89.905.000,0	0,0	18,67
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	3,0	23.002.860,0	0,0	7.990.000,0	1,0	8.670.860,0	3.265.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.990.000,0	0,0	34,73
Predikat Kinerja																							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan laporan administrasi barang milik daerah pada BAPENDA	%	100,0	1.497.665.458,08	100,0	0,0	100,0	564.540.562,08	173.180.600,0	25,0	0,0	25,0	8.565.000,0	25,0	45.615.000,0	75,0	45.615.000,0	75,0	26,34	175,0	45.615.000,0	17,50	3,85

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	6,0	40.845.324,0	0,0	12.724.400,0	2,0	15.396.524,0	13.283.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.724.400,0	0,0	31,15
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	1.800,0	595.455.000,0	0,0	95.020.000,0	1,0	224.455.000,0	90.928.400,0	0,0	0,0	0,0	8.565.000,0	0,0	38.795.000,0	0,0	38.795.000,0	0,0	42,67	0,0	133.815.000,0	0,0	22,47
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	6,0	18.939.000,0	0,0	5.900.000,0	1,0	7.139.000,0	6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.900.000,0	0,0	31,15
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	25,0	16.293.960,0	0,0	5.076.000,0	25,0	6.141.960,0	4.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.076.000,0	0,0	31,15
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,0	548.528.087,04	0,0	93.130.000,0	4,0	206.766.039,04	47.968.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.820.000,0	0,0	6.820.000,0	0,0	14,22	0,0	99.950.000,0	0,0	18,22
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6,0	263.159.087,04	0,0	36.000.000,0	4,0	99.197.039,04	6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.000.000,0	0,0	13,68
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	6,0	14.445.000,0	0,0	4.500.000,0	1,0	5.445.000,0	4.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500.000,0	0,0	31,15
Predikat Kinerja																							
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	874.485.000,0	2.770.330.511,52	291.495.000,0	0,0	291.495.000,0	1.044.267.887,52	681.165.900,0	72.873.750,0	34.459.500,0	72.873.750,0	94.113.808,0	72.873.750,0	124.001.083,0	218.621.250,0	124.001.083,0	75,0	18,20	510.116.250,0	124.001.083,0	58,33	44,8
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokum en	36,0	1.377.509.868,0	0,0	223.302.800,0	1,0	519.248.268,0	285.714.400,0	0,0	11.474.500,0	0,0	30.899.491,0	0,0	42.038.491,0	0,0	42.038.491,0	0,0	14,71	0,0	265.341.291,0	0,0	19,26
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	300,0	80.250.000,0	0,0	60.908.400,0	1,0	30.250.000,0	71.263.700,0	0,0	0,0	0,0	584.000,0	0,0	584.000,0	0,0	584.000,0	0,0	0,82	0,0	61.492.400,0	0,0	76,63
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	36,0	1.312.570.643,52	0,0	98.410.000,0	12,0	494.769.619,52	324.187.800,0	0,0	22.985.000,0	0,0	62.630.317,0	0,0	81.378.592,0	0,0	81.378.592,0	0,0	25,10	0,0	179.788.592,0	0,0	13,70

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
										I		II		III									
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%	
Predikat Kinerja																							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	%	99,0	5.631.023.8 71,24	0,0	0,0	99,0	2.122.597.7 83,24	1.323.296. 400,0	0,0	83.202.20 0,0	0,0	253.402.2 00,0	0,0	496.682.3 00,0	0,0	496.682.3 00,0	0,0	37, 53	0,0	496.682.3 00,0	0,0	8,8 2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	30,0	80.250.000, 0	0,0	260.194.0 00,0	11,0	30.250.000, 0	251.025.4 00,0	0,0	18.000.00 0,0	0,0	59.160.00 0,0	0,0	92.620.00 0,0	0,0	92.620.00 0,0	0,0	36, 90	0,0	352.814.0 00,0	0,0	439 ,64
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokum en	3,0	1.897.850.0 97,60	0,0	129.280.0 00,0	1,0	715.388.977 ,60	67.580.20 0,0	0,0	0,0	0,0	6.870.000 ,0	0,0	25.240.00 0,0	0,0	25.240.00 0,0	0,0	37, 35	0,0	154.520.0 00,0	0,0	8,1 4
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokum en	1.530,0	755.634.00 0,0	0,0	174.620.0 00,0	1,0	284.834.000 ,0	641.568.2 00,0	0,0	65.202.20 0,0	0,0	187.372.2 00,0	0,0	378.822.3 00,0	0,0	378.822.3 00,0	0,0	59, 05	0,0	553.442.3 00,0	0,0	73, 24
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	50,0	20.023.659, 0	0,0	6.237.900, 0	50,0	7.547.859,0	6.237.600, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6.237.900, 0	0,0	31, 15
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	177,0	80.250.000, 0	0,0	218.394.0 00,0	506,0	30.250.000, 0	116.285.0 00,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	218.394.0 00,0	0,0	272 ,14
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	450,0	182.289.48 0,0	0,0	0,0	150,0	68.713.480, 0	210.600.0 00,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	90,0	709.194.93 0,0	0,0	0,0	30,0	267.328.930 ,0	30.000.00 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Predikat Kinerja																							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%	100,0	13.016.779. 746,12	100,0	0,0	100,0	4.906.636.6 02,12	4.085.113. 100,0	25,0	24.000.00 0,0	25,0	239.652.9 55,0	25,0	2.564.810. 655,0	75,0	2.564.810. 655,0	75, 0	62, 78	175,0	2.564.810. 655,0	17 5,0	19, 78
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.422,0	260.950.53 0,0	0,0	112.743.3 51,0	484,0	98.364.530, 0	107.712.0 00,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	112.743.3 51,0	0,0	43, 20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	900,0	147.660.00 0,0	0,0	46.000.00 0,0	400,0	55.660.000, 0	30.000.00 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	46.000.00 0,0	0,0	31, 15

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
										I		II		III									
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	160,0	2.109.833.490,0	0,0	479.909.000,0	60,0	795.295.490,0	269.347.500,0	0,0	0,0	0,0	63.829.995,0	0,0	89.713.995,0	0,0	89.713.995,0	0,0	33,31	0,0	569.622.995,0	0,0	27,0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	90,0	7.814.584.500,0	0,0	2.622.844.500,0	30,0	2.945.684.500,0	2.542.750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.140.800.000,0	0,0	2.140.800.000,0	0,0	84,19	0,0	4.763.644.500,0	0,0	60,96
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	150,0	996.502.770,0	0,0	599.283.000,0	12,0	375.628.770,0	408.668.000,0	0,0	0,0	0,0	39.224.000,0	0,0	39.224.000,0	0,0	39.224.000,0	0,0	9,60	0,0	638.507.000,0	0,0	64,07
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	455,0	666.492.300,0	0,0	232.611.000,0	12,0	251.232.300,0	329.576.000,0	0,0	0,0	0,0	32.703.960,0	0,0	100.605.160,0	0,0	100.605.160,0	0,0	30,53	0,0	333.216.160,0	0,0	50,0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	75,0	898.806.612,60	0,0	152.439.000,0	4,0	338.802.492,60	397.059.600,0	0,0	24.000.000,0	0,0	103.895.000,0	0,0	194.467.500,0	0,0	194.467.500,0	0,0	48,98	0,0	346.906.500,0	0,0	38,60
Predikat Kinerja																							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,0	6.986.364.509,90	100,0	0,0	100,0	2.333.138.809,90	3.961.528.326,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	75,0	0,0	75,0		175,0	0,0	17,50	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	45,0	1.094.133.636,0	0,0	616.900.000,0	20,0	412.430.436,0	69.440.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	616.900.000,0	0,0	56,38
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60,0	3.951.143.873,90	0,0	2.197.493.600,0	400,0	1.189.021.373,90	3.006.088.326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2.197.493.600,0	0,0	55,62
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	3,0	642.000.000,0	0,0	230.000.000,0	1,0	242.000.000,0	50.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	230.000.000,0	0,0	35,83
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6,0	638.790.000,0	0,0	0,0	2,0	240.790.000,0	404.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	50,0		1,0	0,0	16,67	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1.650,0	617.925.000,0	0,0	925.234.000,0	600,0	232.925.000,0	432.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	925.234.000,0	0,0	149,73

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARANA RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
										I		II		III									
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/8*100%	
Predikat Kinerja																							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang urusan PemerintahanDaerah	%	100,0	20.942.084. 328,0	100,0	0,0	100,0	6.980.694.7 76,0	12.364.56 3.360,0	25,0	1.784.017 .817,0	25,0	3.636.926 .347,0	25,0	6.342.268. 126,0	75,0	6.342.268. 126,0	75, 0	51, 29	175,0	6.342.268. 126,0	17 5,8	30, 28
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6.000,0	1.200.000.0 00,0	0,0	206.000.0 00,0	4,0	400.000.000 ,0	111.990.0 00,0	0,0	8.956.000 ,0	0,0	22.793.00 0,0	0,0	22.793.00 0,0	0,0	22.793.00 0,0	0,0	20, 35	0,0	228.793.0 00,0	0,0	19, 07
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,0	18.260.454. 360,0	0,0	5.437.109. 920,0	12,0	6.086.818.1 20,0	5.982.238. 536,0	0,0	1.274.060 .357,0	0,0	2.458.614 .596,0	0,0	3.716.246. 942,0	0,0	3.716.246. 942,0	0,0	62, 12	0,0	9.153.356. 862,0	0,0	50, 13
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	45,0	569.857.68 0,0	0,0	150.000.0 00,0	4,0	189.952.560 ,0	2.788.077. 744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	696.207.2 43,0	0,0	696.207.2 43,0	0,0	24, 97	0,0	846.207.2 43,0	0,0	148 ,49
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100,0	911.772.28 8,0	0,0	1.796.858. 064,0	4,0	303.924.096 ,0	3.482.257. 080,0	0,0	501.001.4 60,0	0,0	1.155.518 .751,0	0,0	1.907.020. 941,0	0,0	1.907.020. 941,0	0,0	54, 76	0,0	3.703.879. 005,0	0,0	406 ,23
Predikat Kinerja																							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Dalam Kondisi Baik	Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,0	9.073.035.3 88,0	100,0	0,0	100,0	2.966.716.1 58,0	6.311.013. 220,0	25,0	527.045.7 50,0	25,0	1.500.967 .400,0	25,0	2.388.055. 225,0	75,0	2.388.055. 225,0	75, 0	37, 84	175,0	2.388.055. 225,0	17 5,8	26, 32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	71,0	3.104.676.1 72,0	0,0	1.203.668. 400,0	155,0	977.263.086 ,0	844.030.0 00,0	0,0	19.274.00 0,0	0,0	279.282.4 00,0	0,0	314.081.6 00,0	0,0	314.081.6 00,0	0,0	37, 21	0,0	1.517.750. 000,0	0,0	48, 89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara Pajak dan Perizinannya	Unit	84,0	150.000.00 0,0	0,0	581.388.8 00,0	155,0	50.000.000. 0	654.840.0 00,0	0,0	0,0	0,0	26.291.50 0,0	0,0	99.342.50 0,0	0,0	99.342.50 0,0	0,0	15, 17	0,0	680.731.3 00,0	0,0	453 ,82
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara	Unit	200,0	111.700.00 0,0	0,0	0,0	50,0	55.850.000. 0	55.500.00 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUA N	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARA N RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/8*100%	
1	2	5	6		7		8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/8*100%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	360,0	1.855.850.000,0	0,0	573.247.000,0	120,0	600.000.000,0	467.670.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.580.000,0	0,0	17.580.000,0	0,0	3,76	0,0	590.827.000,0	0,0	31,84
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1,0	1.600.050.000,0	0,0	658.925.000,0	5,0	533.350.000,0	545.085.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	658.925.000,0	0,0	41,18
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	26,0	2.250.759.216,0	0,0	3.661.936.888,0	26,0	750.253.072,0	3.743.887.500,0	0,0	507.771.750,0	0,0	1.195.393.500,0	0,0	1.957.051.125,0	0,0	1.957.051.125,0	0,0	52,27	0,0	5.618.988.013,0	0,0	249,65
Predikat Kinerja																							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan.

Hal ini dapat dilihat dalam 2 (dua) tahun terakhir Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari kelima sektor pajak yang dikelola Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), dan pajak rokok.

Dengan berbagai upaya untuk mencapai target penerimaan pajak yang lebih baik, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan telah mengambil inisiatif berupa peningkatan transaksi secara non tunai, pengembangan layanan unggulan, serta kerjasama dengan berbagai instansi terkait. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2022 Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan juara pada ajang South Sulawesi Digital Festival dan meraih juara ketiga kategori One Page Summary Contest untuk Pemerintah Daerah yang diberikan atas inovasi pembayaran pajak kendaraan secara digital dan pada tahun 2023 Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan kembali mendapatkannya juara ketiga pada ajang South Sulawesi Digital Festival 2023 dengan kategori Aplikasi pembayaran pajak secara digital yang bernama Bapenda Sulsel mobile. Penghargaan tidak hanya datang dari tingkat Provinsi, tetapi juga ditingkat nasional Bapenda Provinsi Sulawesi

Selatan juga berhasil meraih penghargaan juara pertama dalam penghargaan TP2DD (Tim Pengendalian Pembayaran Pajak Daerah) sebagai provinsi terbaik di kawasan Indonesia Timur

Prestasi-prestasi tersebut menegaskan bahwa kontribusi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam inovasi, dan layanan yang lebih baik serta dalam pengelolaan pajak yang lebih efektif. Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang lebih optimal, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan sejumlah langkah strategis untuk mendorong pembayaran non tunai melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile yang memungkinkan pembayaran pajak melalui perangkat selular dengan payment channel seperti Qris, Gojek, Mobile Banking Bank Sulselbar, LinkAja, Indomaret, dan Tokopedia. Dari berbagai pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam transaksi pajak dengan memperkuat pengawasan internal dan efisiensi melalui aplikasi padaidi, dimana aplikasi ini memungkinkan Kepala Bapenda untuk memantau kinerja pegawai dan realisasi layanan penerimaan pajak dengan lebih terstruktur, yang memungkinkan tindakan lebih cepat dalam mengatasi kendala dan memastikan pelaporan yang akurat.

Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mengembangkan layanan unggulan seperti samsat care, samsat keliling, samsat lorong, dan gerai samsat yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk membayar pajak, meskipun Bapenda fokus pada pembayaran nontunai, opsi pembayaran tunai juga masih tetap tersedia, untuk kebutuhan berbagai kelompok masyarakat serta memberikan insentif pajak sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19 yang mencakup penghapusan denda PKB dan BBNKB serta penghapusan progresif yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat pasca pandemi, langkah ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Selain itu, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan juga menjalin kerjasama sinergitas dengan berbagai instansi terkait untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan layanan yang lebih baik termasuk kerjasama dengan kepolisian daerah Sulsel dalam penertiban kendaraan bermotor dan penagihan pajak secara door to door serta kerjasama dengan DPMPTSP untuk verifikasi bebas tunggakan pajak sebelum perizinan diterbitkan, selain itu kerjasama juga dilakukan dengan Bank Sulselbar melalui aplikasi Sipijar yang dapat membantu perluasan dan percepatan digitalisasi pembayaran pajak daerah (P2DD) serta memberikan insentif bagi wajib pajak dalam pembayaran PKB dan pembukaan tabungan pajak.

Semua kerjasama ini mendukung efisiensi dan kesinambungan penerimaan pajak, langkah-langkah ini tercermin dalam data realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2022 sampai 2023 sampe bulan september, yang dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi APBD Pendaftan Daerah
Tahun 2022-2023

JENIS PENERIMAAN	TARGET 2022 (Rp)	REALISASI S/D BULAN DESEMBER	%	TARGET TA.2023 (Rp)	REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER	%
PENDAPATAN DAERAH	9.494.627.304.164,00	8.992.799.689.251,16	94,72	10.133.082.075.208,00	5.888.971.026.554,28	58,12
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.153.507.054.141,00	4.865.959.663.141,11	94,42	5.801.319.086.208,00	3.501.024.683.710,28	60,35
PAJAK DAERAH	4.415.955.704.320,00	4.304.408.113.491,08	97,47	4.972.162.369.090,00	3.076.193.994.962,52	61,87
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.449.550.108.000,00	1.502.530.102.481,00	103,65	1.594.505.119.000,00	1.113.112.773.551,00	69,81
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.001.835.067.000,00	1.052.446.901.201,00	105,05	1.102.018.574.000,00	769.751.495.628,00	69,85
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.144.619.102.000,00	840.577.299.400,00	10==73,44	1.316.311.967.000,00	605.414.491.307,00	45,99
Pajak Air Permukaan	179.510.989.000,00	184.584.217.577,08	102,83	193.155.588.000,00	144.710.255.397,59	74,92
Pajak Rokok	640.440.438.325,00	724.269.612.832,00	113,09	766.171.121.090,00	443.204.979.079,00	57,85
RETRIBUSI DAERAH	49.452.842.400,00	44.123.665.319,20	89,22	50.054.727.951,00	29.448.361.802,00	58,83
Retribusi Jasa Umum	18.597.400.000,00	14.810.935.600,00	79,64	18.306.688.001,00	13.800.745.282,00	75,39
Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.002.900.000,00	14.064.525.600,00	78,12	17.032.188.001,00	-	78,12
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	15.500.000,00			-	
Retribusi Pelayanan Pendidikan	594.500.000,00	730.910.000,00	112,95	1.274.500.000,00	-	112,95
Retribusi Jasa Usaha	28.855.442.400,00	28.037.985.719,20	97,17	30.748.039.950,00	14.716.646.520,00	47,86
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	21.194.702.400,00	20.668.137.704,20	97,52	21.855.534.100,00	-	97,52
Retribusi Terminal	300.000.000,00	198.956.500,00	66,32	200.000.000,00	-	66,32
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.804.330.000,00	1.409.819.815,00	78,14	1.088.650.650,00	-	78,14
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	432.160.000,00	329.442.500,00	76,23	494.160.000,00	-	76,23
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.124.250.000,00	5.431.629.200,00	106	7.109.695.200,00	-	106
Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000.000,00	1.274.744.000,00	63,74	1.000.000.000,00	930.970.000,00	93,1

JENIS PENERIMAAN	TARGET 2022 (Rp)	REALISASI S/D BULAN DESEMBER	%	TARGET TA.2023 (Rp)	REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER	%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	136.116.485.452,00	135.416.485.452,00	99,49	159.362.075.963,00	132.053.989.662,00	82,86
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	134.054.613.792,00	133.354.613.792,00	99,48	155.872.340.237,00	131.674.016.520,00	84,48
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	-	0	0	15.000.000.000,00	0	0
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	2.061.871.660,00	2.061.871.660,00	100	3.489.735.726,00	379.373.142,00	10,87
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	551.982.021.964,00	382.011.378.878,83	69,21	619.739.913.204,00	263.328.937.283,69	42,49
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	618.417.000,00	624.598.255,00	101	29.963.550.000,00	776.524.000,00	2,59
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.446.286.000,00	2.677.060.791,00	77,68	2.136.032.800,00	2.514.995.000,00	117,74
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0	1.455.000.000,00	881.821.410,00	60,61
Jasa Giro	23.472.989.862,00	25.740.490.388,51	109,66	22.721.305.505,00	12.277.441.538,15	54,03
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	54.178.909.512,00	11.775.183.240,03	21,73	65.671.360.077,00	10.200.000,00	0,02
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.530.845.001,00	4.668.221.454,81	44,33	4.695.621.452,00	32.050.883.574,17	682,57
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	16.032.810.149,00	3.716.993.260,83	55,87	9.493.905.195,00	4.985.178.483,83	52,51
Pendapatan Denda Pajak Daerah	208.712.589.000,00	79.710.867.273,00	38,19	265.789.679.000,00	59.968.454.438,00	22,56
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	393.984,00	30.227.208,00	7.672,19	1.288.196,00	2.573.252,00	199,76
Pendapatan dari Pengembalian	5.034.562.500,00	2.725.744.664,00	54,14	1.329.231.476,00	1.299.341.697,04	97,75
Pendapatan BLUD	229.954.218.956,00	245.100.898.367,50	106,59	216.482.939.503,00	147.972.483.609,50	68,35
PENDAPATAN TRANSFER	4.196.566.050.162,00	4.096.755.656.038,00	97,62	4.322.253.099.000,00	2.379.760.513.014,00	55,06
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4.196.566.050.162,00	4.096.755.656.038,00	97,62	4.322.253.099.000,00	2.379.760.513.014,00	55,06

JENIS PENERIMAAN	TARGET 2022 (Rp)	REALISASI S/D BULAN DESEMBER	%	TARGET TA.2023 (Rp)	REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER	%
Dana Perimbangan	4.196.566.050.162,00	4.096.755.656.038,00	97,62	4.267.681.602.000,00	2.352.474.764.514,00	55,12
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	144.554.199.861,00	30.084.370.072,05	20,81	9.509.890.000,00	8.185.829.830,00	86,08
PENDAPATAN HIBAH	144.554.199.861,00	30.084.370.072,05	20,81	9.509.890.000,00	8.185.829.830,00	86,08
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	137.249.159.861,00	22.494.481.608,00	16,39	2.163.250.000,00	3.207.378.459,00	148,27
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	4.256.040.000,00	4.256.040.000,00	100	4.256.040.000,00	3.287.858.850,00	77,25
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	3.049.000.000,00	3.333.848.464,05	109,34	3.090.600.000,00	1.690.592.521,00	54,70
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan	0	0	0	0	0	0
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0	0	0	0	0	0
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0	0	0	0	0	0

Selain inovasi yang telah dilaksanakan di atas, secara berkelanjutan Bapenda juga melakukan peningkatan kualitas SDM aparatur laki-laki dan perempuan pengelola administrasi pendapatan daerah, SDM operator sistem dan operator data serta SDM pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu kepada wajib pajak dilakukan sosialisasi dan penertiban pajak, serta dilakukan himbauan atau penagihan pajak kepada masyarakat wajib pajak yang terlambat membayar kewajiban pajaknya.

Perhitungan potensi yang ada serta pemanfaatannya sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan pembangunan merupakan salah satu kaidah dalam perencanaan. Namun demikian hal tersebut masih belum dilakukan sebagaimana mestinya akibat kurangnya ketersediaan data.

Di masa depan, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda, hasil kajian tentang potensi pendapatan asli daerah merupakan landasan dalam menetapkan sasaran perangkat daerah dan target pendapatan daerah. Tabel dibawah menunjukkan capaian realisasi kinerja sasaran Renstra serta proyeksi kedepannya, sebagai berikut:

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (INPUT)	SPM	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Temuan Material			Persen	0,7%	0,6%	0,5%	0,002%	0,0%	0,0%	0,0%	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Bapenda			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan laporan administrasi barang milik daerah pada BAPENDA			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah			Rp	291495000	291495000	291495000	291495000	291495000	291495000	291495000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (INPUT)	SPM	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Kantor			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah Dalam Kondisi Baik			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan laporan hasil koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah bidang pendapatan daerah			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	cakupan hasil koordinasi dan pelaporan bidang pendapatan dengan bidang terkait			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentasi Peningkatan PAD			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan laporan pengelolaan pendapatan daerah			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kontribusi PAD Terhadap APBD Masih rendah yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah belum optimal dari seluruh potensi yang ada. Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda, maka isu permasalahan yang di hadapi Bapenda dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk membayar pajaknya tepat waktu.

Seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, penyuluhan/ sosialisasi untuk memberi kesadaran/kepatuhan masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Kesadaran ini sangat dibutuhkan agar anggaran yang digunakan untuk pemungutan pajak dapat ditekan sehingga pendapatan daerah dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara mencakup reformasi dibidang pelayanan yang harus dimulai dari aspek yang paling besar yaitu pola pikir, pola tindak, tata busana serta tutur kata dalam berkomunikasi.

2. Belum optimalnya sumber daya perangkat daerah.

Paradigma masyarakat terhadap sulitnya mengurus pajak maupun membayar pajak masih ada. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur Bapenda serta ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif perlu mendapatkan perhatian yang serius. Disamping itu, masyarakat perlu diberikan kepercayaan bahwa pajak yang dibayarkan adakah benar-benar untuk memajukan pembangunan daerah. Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan antara lain adalah:

- a. Membentuk aparat yang profesional;
- b. Membentuk aparat yang transparan, yaitu aparat harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
- c. Membentuk aparat yang akuntabel, artinya aparat harus bertanggungjawab dan bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas.

3. Belum maksimalnya inovasi pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi

Prinsip pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Oleh karena itu, Bapenda harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan masyarakat. Selain meningkatkan kualitas kemampuan teknis aparatur dan perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi tuntutan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawali program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Pembangunan Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja).

Dalam rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan telah sesuai dengan perencanaan awal yang telah diusulkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan baik dari segi jumlah program, jumlah kegiatan, dan jumlah sub kegiatan, target indikator, serta pagu indikatif untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan serta telah dilakukan review pembahasan dan verifikasi serta finalisasi pemetaan program dan kegiatan serta subkegiatan.

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Badan Pendapatan Daerah				Rp 200.029.927.957,00	Badan Pendapatan Daerah				Rp 198.216.417.956,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Makassar	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	98 %	Rp 178.531.817.079,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Makassar	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	98 %	Rp 194.305.193.806,00	
		Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	98 %				Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	98 %		
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%				Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%		
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp 808.047.900,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp 493.749.900,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	Rp 92.821.200,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	Rp 143.340.800,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 149.505.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 119.961.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (dokumen)	1 dokumen	Rp 118.097.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (dokumen)	1 dokumen	Rp 21.840.900,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 144.864.600,00	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 43.210.900,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 98.831.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 109.846.500,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 37.940.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 28.199.900,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 165.988.200,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 27.349.900,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	Rp 147.389.969.818,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	Rp 156.109.920.687,00	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	484 orang/bulan	Rp 146.761.397.418,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	484 orang/bulan	Rp 155.719.622.587,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 42.390.300,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 11.130.000,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 269.984.200,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 137.740.500,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp 34.486.500,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp 37.296.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	Rp 5.226.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	Rp 3.372.000,00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	Rp 173.619.400,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	Rp 99.848.300,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 99.810.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 97.815.800,00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 3.056.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 3.095.500,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada BAPENDA	12 Laporan	Rp 219.611.500,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada BAPENDA	12 Laporan	Rp 187.386.700,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 12.719.500,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 12.614.800,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 116.385.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 101.094.600,00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 Laporan	Rp 6.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 Laporan	Rp 6.000.000,00	
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	25 Laporan	Rp 5.052.000,00	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	25 Laporan	Rp 5.024.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	Rp 68.955.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	Rp 52.433.200,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	Rp 6.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	Rp 5.800.000,00	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 4.500.000,00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 4.420.100,00	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan	Rp 711.976.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan	Rp 680.942.200,00	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	12 Dokumen	Rp 280.535.300,00	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	12 Dokumen	Rp 88.399.200,00	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	1 Laporan	Rp 117.827.700,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	1 Laporan	Rp 77.753.300,00	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan data retribusi daerah	12 Laporan	Rp 313.613.000,00	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan data retribusi daerah	12 Laporan	Rp 514.789.700,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	Cakupan Jumlah Dokumen Kepegawaian	100 %	Rp 872.911.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	Cakupan Jumlah Dokumen Kepegawaian	100 %	Rp 1.096.230.800,00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	11 Unit	Rp 231.104.600,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	11 Unit	Rp 275.206.800,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	484 Paket	Rp 143.400.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	484 Paket	Rp -	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	Rp 111.231.400,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	Rp 98.419.800,00	
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	Rp 335.675.000,00	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	Rp 296.758.200,00	
Pemindahan Tugas ASN	Makassar	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	20 Orang	Rp 6.000.000,00	Pemindahan Tugas ASN	Makassar	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	20 Orang	Rp -	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	Rp 6.500.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	Rp 6.500.000,00	
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Makassar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	Rp 3.000.000,00	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Makassar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	Rp 3.000.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Makassar	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	Rp 36.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Makassar	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	Rp 416.346.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	Rp 4.244.230.470,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	Rp 5.390.994.000,00	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 Paket	Rp 146.414.190,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 Paket	Rp 102.326.500,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Paket	Rp 44.200.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Paket	Rp 22.350.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	50 Paket	Rp 331.653.480,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	50 Paket	Rp 1.297.575.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	20 Paket	Rp 2.399.750.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	20 Paket	Rp 3.000.000.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	Rp 481.102.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	Rp 497.526.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 609.330.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 402.180.000,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp 3.648.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp -	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Rp 228.132.800,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Rp 69.036.500,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Cakupan Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	Rp 8.642.702.119,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Cakupan Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	Rp 5.661.281.000,00	
Pengadaan Mebel	Makassar	jumlah paket mebel yang disediakan	10 paket	Rp 633.059.000,00	Pengadaan Mebel	Makassar	jumlah paket mebel yang disediakan	10 paket	Rp 329.271.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	400 Unit	Rp 6.423.888.905,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	400 Unit	Rp 2.156.528.000,00	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Unit aset tak berwujud yang disediakan	1 Unit	Rp 356.500.000,00	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Unit aset tak berwujud yang disediakan	1 Unit	Rp -	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	11 unit	Rp 202.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	11 unit	Rp 340.370.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	Rp 353.923.500,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	Rp 2.835.112.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	Rp 673.330.714,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	Rp -	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 laporan	Rp 9.345.776.240,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 laporan	Rp 16.634.947.113,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	Rp 112.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	Rp 110.240.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	Rp 5.670.445.960,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	Rp 8.985.793.141,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	Rp 84.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	Rp 2.943.126.540,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	Rp 3.479.330.280,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	Rp 4.595.787.432,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1099 Unit	Rp 6.296.592.032,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1099 Unit	Rp 8.049.741.406,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	155 Unit	Rp 1.291.144.400,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	155 Unit	Rp 701.270.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	155 Unit	Rp 751.246.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	155 Unit	Rp 599.573.950,00	
Pemeliharaan Mebel	Makassar	Jumlah mebel yang dipelihara	165 Unit	Rp 392.810.720,00	Pemeliharaan Mebel	Makassar	Jumlah mebel yang dipelihara	165 Unit	Rp 55.500.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	592 Unit	Rp 55.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	592 Unit	Rp 492.630.000,00	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	6 Unit	Rp 445.955.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	6 Unit	Rp 346.800.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	26 Unit	Rp 3.359.935.912,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	26 Unit	Rp 5.853.967.456,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Makassar	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	100 %	Rp 1.182.790.200,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Makassar	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	100 %	Rp 686.466.600,00	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Makassar	Cakupan laporan hasil koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah bidang pendapatan daerah	100%	Rp 714.715.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Makassar	Cakupan laporan hasil koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah bidang pendapatan daerah	100%	Rp 413.707.100,00	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Makassar	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1 dokumen	Rp 92.993.800,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Makassar	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1 dokumen	Rp 9.932.200,00	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Makassar	jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	1 dokumen	Rp 98.047.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Makassar	jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	1 dokumen	Rp 12.664.800,00	
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Makassar	dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 22.141.700,00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Makassar	dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 9.176.800,00	
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	Makassar	dokumen perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 24.794.600,00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	Makassar	dokumen perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 10.283.700,00	
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Makassar	dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 27.452.000,00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Makassar	dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 7.896.400,00	
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	Makassar	dokumen perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 24.807.000,00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	Makassar	dokumen perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Rp 9.126.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Makassar	jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	Rp 71.723.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Makassar	jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	Rp 64.706.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Makassar	jumlah peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	Rp 46.904.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Makassar	jumlah peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	Rp 78.029.500,00	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Makassar	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	1 dokumen	Rp 305.852.100,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Makassar	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	1 dokumen	Rp 211.891.700,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Makassar	cakupan hasil koordinasi dan pelaporan bidang pendapatan dengan bidang terkait	100%	Rp 468.074.400,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Makassar	cakupan hasil koordinasi dan pelaporan bidang pendapatan dengan bidang terkait	100%	Rp 272.759.500,00	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Makassar	jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	12 laporan	Rp 414.446.100,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Makassar	jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	12 laporan	Rp 221.486.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Makassar	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi	12 Laporan	Rp 53.628.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Makassar	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi	12 Laporan	Rp 51.273.500,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Provinsi Sulawesi Selatan	Persentasi Peningkatan PAD	5 %	Rp 20.315.320.678,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Provinsi Sulawesi Selatan	Persentasi Peningkatan PAD	5 %	Rp 3.224.757.550,00	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan pengelolaan pendapatan daerah	12 Laporan	Rp 20.315.320.678,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan pengelolaan pendapatan daerah	12 Laporan	Rp 3.224.757.550,00	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	4 Dokumen	Rp 799.167.200,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	4 Dokumen	Rp 666.682.300,00	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	4 Dokumen	Rp 129.570.300,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	4 Dokumen	Rp 80.529.000,00	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	4 Laporan	Rp 108.850.200,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	4 Laporan	Rp 66.932.100,00	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Makassar I Selatan)	20 sarana dan prasarana	Rp 867.746.900,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Makassar I Selatan)	20 sarana dan prasarana	Rp 569.532.850,00	
	Enrekang	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Enrekang)	20 sarana dan prasarana			Enrekang	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Enrekang)	20 sarana dan prasarana		
	Jeneponto	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Jeneponto)	20 sarana dan prasarana			Jeneponto	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Jeneponto)	20 sarana dan prasarana		
	Luwu Utara	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Luwu Utara)	20 sarana dan prasarana			Luwu Utara	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Luwu Utara)	20 sarana dan prasarana		
	Toraja Utara	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Toraja Utara)	20 sarana dan prasarana			Toraja Utara	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Toraja Utara)	20 sarana dan prasarana		
	Selayar	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Selayar)	20 sarana dan prasarana			Selayar	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Selayar)	20 sarana dan prasarana		
	Takalar	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Takalar)	20 sarana dan prasarana			Takalar	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Takalar)	20 sarana dan prasarana		
	Sinjai	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Sinjai)	20 sarana dan prasarana			Sinjai	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Sinjai)	20 sarana dan prasarana		
	Luwu	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Luwu)	20 sarana dan prasarana			Luwu	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Luwu)	20 sarana dan prasarana		
	barru	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Barru)	20 sarana dan prasarana			barru	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Barru)	20 sarana dan prasarana		
	Bulukumba	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Bulukumba)	20 sarana dan prasarana			Bulukumba	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Bulukumba)	20 sarana dan prasarana		
	Tana Toraja	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Tana Toraja)	20 sarana dan prasarana			Tana Toraja	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Tana Toraja)	20 sarana dan prasarana		
	Luwu Timur	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Luwu Timur)	20 sarana dan prasarana			Luwu Timur	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Luwu Timur)	20 sarana dan prasarana		

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Soppeng	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Soppeng)	20 sarana dan prasarana			Soppeng	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Soppeng)	20 sarana dan prasarana		
	Sidrap	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Sidrap)	20 sarana dan prasarana			Sidrap	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Sidrap)	20 sarana dan prasarana		
	Wajo	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Wajo)	20 sarana dan prasarana			Wajo	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Wajo)	20 sarana dan prasarana		
	Bantaeng	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Bantaeng)	20 sarana dan prasarana			Bantaeng	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Bantaeng)	20 sarana dan prasarana		
	Gowa	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Gowa)	20 sarana dan prasarana			Gowa	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Gowa)	20 sarana dan prasarana		
	Pinrang	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Pinrang)	20 sarana dan prasarana			Pinrang	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Pinrang)	20 sarana dan prasarana		
	Pangkep	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Pangkep)	20 sarana dan prasarana			Pangkep	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Pangkep)	20 sarana dan prasarana		
	Bone	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Bone)	20 sarana dan prasarana			Bone	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Bone)	20 sarana dan prasarana		
	Palopo	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Palopo)	20 sarana dan prasarana			Palopo	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Palopo)	20 sarana dan prasarana		
	Pare-pare	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Pare-pare)	20 sarana dan prasarana			Pare-pare	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Pare-pare)	20 sarana dan prasarana		
	Makassar	Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara (Unit)	30 sarana dan prasarana			Makassar	Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara (Unit)	30 sarana dan prasarana		
	Maros	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Maros)	20 sarana dan prasarana			Maros	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Maros)	20 sarana dan prasarana		
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Wajo	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Wajo)	12 Laporan	Rp 310.310.400,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Wajo	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Wajo)	12 Laporan	Rp 204.355.600,00	
	Selayar	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Selayar)	12 Laporan			Selayar	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Selayar)	12 Laporan		

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sinjai	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Takalar)	12 Laporan			Sinjai	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Takalar)	12 Laporan		
	Makassar	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Makassar I Selatan)	12 Laporan			Makassar	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Makassar I Selatan)	12 Laporan		
	Makassar	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Makassar II Utara)	12 Laporan			Makassar	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Makassar II Utara)	12 Laporan		
	Pare-pare	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Pare-pare)	12 Laporan			Pare-pare	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Pare-pare)	12 Laporan		
	Bone	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Bone)	12 Laporan			Bone	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Bone)	12 Laporan		
	Bantaeng	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Bantaeng)	12 Laporan			Bantaeng	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Bantaeng)	12 Laporan		
	Gowa	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Gowa)	12 Laporan			Gowa	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Gowa)	12 Laporan		
	Pinrang	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Pinrang)	12 Laporan			Pinrang	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Pinrang)	12 Laporan		
	Maros	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Maros)	12 Laporan			Maros	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Maros)	12 Laporan		
	Palopo	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Palopo)	12 Laporan			Palopo	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Palopo)	12 Laporan		
	Pangkep	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Pangkep)	12 Laporan			Pangkep	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Pangkep)	12 Laporan		
	Sidrap	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Sidrap)	12 Laporan			Sidrap	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Sidrap)	12 Laporan		
	Tana Toraja	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (tana Toraja)	12 Laporan			Tana Toraja	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (tana Toraja)	12 Laporan		
	Luwu Timur	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Luwu Timur)	12 Laporan			Luwu Timur	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Luwu Timur)	12 Laporan		

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Soppeng	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Soppeng)	12 Laporan			Soppeng	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Soppeng)	12 Laporan		
	Bulukumba	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Bulukumba)	12 Laporan			Bulukumba	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Bulukumba)	12 Laporan		
	Luwu Utara	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Luwu Utara)	12 Laporan			Luwu Utara	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Luwu Utara)	12 Laporan		
	barru	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (barru)	12 Laporan			barru	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (barru)	12 Laporan		
	Luwu	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Luwu)	12 Laporan			Luwu	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Luwu)	12 Laporan		
	Sinjai	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Sinjai)	12 Laporan			Sinjai	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Sinjai)	12 Laporan		
	Toraja Utara	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Toraja Utara)	12 Laporan			Toraja Utara	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Toraja Utara)	12 Laporan		
	Enrekang	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Enrekang)	12 Laporan			Enrekang	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Enrekang)	12 Laporan		
	Jeneponto	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Jeneponto)	12 Laporan			Jeneponto	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Jeneponto)	12 Laporan		
Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Makassar	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	12 Laporan	Rp 310.899.500,00	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bantaeng	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	12 Laporan	Rp 247.765.900,00	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Wajo	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Rp 142.752.400,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Wajo	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Rp 68.392.400,00	
	Selayar	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Selayar	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Sinjai	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Sinjai	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Makassar	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Makassar	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Makassar	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Makassar	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Pare-pare	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Pare-pare	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bone	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Bone	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Bantaeng	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Bantaeng	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Gowa	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Gowa	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Pinrang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Pinrang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Maros	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Maros	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Palopo	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Palopo	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Pangkep	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Pangkep	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Sidrap	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Sidrap	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Tana Toraja	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Tana Toraja	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Luwu Timur	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Luwu Timur	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Soppeng	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Soppeng	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Bulukumba	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Bulukumba	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Luwu Utara	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Luwu Utara	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	barru	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			barru	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Luwu	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Luwu	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Sinjai	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Sinjai	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Toraja Utara	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Toraja Utara	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Enrekang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Enrekang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
	Jeneponto	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			Jeneponto	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan		
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Makassar	Jumlah laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 Laporan	Rp 412.067.300,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Makassar	Jumlah laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 Laporan	Rp 419.151.600,00	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah dokumen yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	12 Dokumen	Rp 125.605.900,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah dokumen yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	12 Dokumen	Rp 438.110.200,00	
Penagihan Pajak Daerah	Wajo	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Makassar I Selatan)	4 Dokumen SSPD	Rp 757.341.300,00	Penagihan Pajak Daerah	Wajo	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Makassar I Selatan)	4 Dokumen SSPD	Rp 272.899.800,00	
	Selayar	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Makassar II Utara)	4 Dokumen SSPD			Selayar	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Makassar II Utara)	4 Dokumen SSPD		
	Sinjai	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Pare-pare)	4 Dokumen SSPD			Sinjai	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Pare-pare)	4 Dokumen SSPD		
	Makassar	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Palopo)	4 Dokumen SSPD			Makassar	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Palopo)	4 Dokumen SSPD		
	Makassar	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Bone)	4 Dokumen SSPD			Makassar	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Bone)	4 Dokumen SSPD		
	Pare-pare	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Wajo)	4 Dokumen SSPD			Pare-pare	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Wajo)	4 Dokumen SSPD		
	Bone	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Bantaeng)	4 Dokumen SSPD			Bone	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Bantaeng)	4 Dokumen SSPD		
	Bantaeng	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Gowa)	4 Dokumen SSPD			Bantaeng	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Gowa)	4 Dokumen SSPD		
	Gowa	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Pinrang)	4 Dokumen SSPD			Gowa	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Pinrang)	4 Dokumen SSPD		
	Pinrang	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Maros)	4 Dokumen SSPD			Pinrang	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Maros)	4 Dokumen SSPD		
	Maros	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Pangkep)	4 Dokumen SSPD			Maros	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Pangkep)	4 Dokumen SSPD		
	Palopo	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Sidrap)	4 Dokumen SSPD			Palopo	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Sidrap)	4 Dokumen SSPD		
	Pangkep	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Tana Toraja)	4 Dokumen SSPD			Pangkep	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Tana Toraja)	4 Dokumen SSPD		
	Sidrap	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Luwu Timur)	4 Dokumen SSPD			Sidrap	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Luwu Timur)	4 Dokumen SSPD		
	Tana Toraja	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Soppeng)	4 Dokumen SSPD			Tana Toraja	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Soppeng)	4 Dokumen SSPD		
	Luwu Timur	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Bulukumba)	4 Dokumen SSPD			Luwu Timur	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Bulukumba)	4 Dokumen SSPD		
	Soppeng	Jumlah unit kendaraan yang terjamin pada UPT Pendapatan Wilayah Baru (Unit)	4 Dokumen SSPD			Soppeng	Jumlah unit kendaraan yang terjamin pada UPT Pendapatan Wilayah Baru (Unit)	4 Dokumen SSPD		
	Bulukumba	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Luwu)	4 Dokumen SSPD			Bulukumba	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Luwu)	4 Dokumen SSPD		

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan Dana				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Luwu Utara	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Sinjai)	4 Dokumen SSPD			Luwu Utara	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Sinjai)	4 Dokumen SSPD		
	baru	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Takalar)	4 Dokumen SSPD			baru	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Takalar)	4 Dokumen SSPD		
	Luwu	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Selayar)	4 Dokumen SSPD			Luwu	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Selayar)	4 Dokumen SSPD		
	Sinjai	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Toraja Utara)	4 Dokumen SSPD			Sinjai	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Toraja Utara)	4 Dokumen SSPD		
	Toraja Utara	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Luwu Utara)	4 Dokumen SSPD			Toraja Utara	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Luwu Utara)	4 Dokumen SSPD		
	Enrekang	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Jeneponto)	4 Dokumen SSPD			Enrekang	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Jeneponto)	4 Dokumen SSPD		
	Jeneponto	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Enrekang)	4 Dokumen SSPD			Jeneponto	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Enrekang)	4 Dokumen SSPD		
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Makassar	jumlah dokumen keberatan yang telah ditindaklanjuti	5 dokumen surat persetujuan/penolakan	Rp 760.615.100,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Makassar	jumlah dokumen keberatan yang telah ditindaklanjuti	5 dokumen surat persetujuan/penolakan	Rp 54.464.200,00	
Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah	25 Laporan	Rp 2.461.017.500,00	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Makassar	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah	25 Laporan	Rp 111.743.600,00	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Makassar	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	12 laporan	Rp 13.129.376.678,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Makassar	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	12 laporan	Rp 24.198.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya juga memperhatikan usulan dari masyarakat karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut diperoleh dari Musrembang dimana semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dilakukan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Namun Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan organisasi perangkat Daerah yang hanya menunjang tugas dan fungsi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang tidak terlibat secara langsung dalam tugas-tugasnya dan kegiatannya yang dijalankannya dengan masyarakat, tetapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hanya menjalankan kegiatannya agar masyarakat sadar akan kewajibannya membayar pajak untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, Rencana Kerja (Renja) Bapenda tahun 2024 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel T-C. 32
Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terutama pada pasal 27 ayat 2 yaitu Rancangan Renja- SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan Akhir RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, telah menjadi acuan utama bagi satuan kerja pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja tahunnya.

Kemudian pasal 23 ayat 4 pada peraturan ini juga mempertegas hal tersebut, yaitu bahwa RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan adanya aturan perundangan tersebut maka Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang terkait dengan program dan kegiatan dibidang pendapatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi.

Selain itu visi Presiden dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah “ Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.

Berdasarkan visi tersebut ditemukan keterkaitan dengan Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan sehingga tidak terlalu membebani keuangan pemerintah pusat.

Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga menjadi tujuan dari rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tiap tahunnya.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam perencanaan strategis perumusan tujuan dan sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi harus mampu bekerja untuk meningkatkan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan melalui inovasi-inovasi dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

Dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Bapenda dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu 3 (tiga) tahun yang akan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahunn 2024-2026 merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan maka Bapenda menetapkan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah;

2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tabel dibawah ini menunjukkan Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan beserta target yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024

No	Tujuan BAPENDA Tahun 2024-2026	Sasaran BAPENDA Tahun 2024-2026	Indikator Tujuan / sasaran	Target
				2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah		Tingkat Kemandirian fiskal daerah (%)	59,54
a.		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD Tiap Tahun	12,00
b.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak	90
2	Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah		Nilai SAKIP Bapenda	(81-90) Kategori A
a.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	100%
b.			Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100
c.			Persentase Temuan Material	0,05

3.3 Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 maka program dan kegiatan dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk operasional. Program/kegiatan baik strategis

maupun operasional merupakan tanggungjawab Perangkat daerah dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adapun program yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, yaitu :

1. Program Operasional yang terdiri dari :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Strategis yang terdiri dari :
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada Renca Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004 memiliki 2 (dua) Program operasional, dan 1 (satu) program strategis dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 79 (tujuh puluh sembilan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 198.216.417.956,00.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindai terjadinya *mis-interpretasi*, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa RKPD tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah merencanakan pelaksanaan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 79 (tujuh puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 198.216.417.956,00.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan ini menjadi instrument penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, untuk menilai apakah hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dicapai adalah sebuah keberhasilan atau kegagalan, maka diperlukan adanya indikator kinerja serta pendanaan yang indikatif yang menggambarkan tolak ukur kinerja atau target yang diinginkan untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakn, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan dan juga sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Pendanaan indikatif merupakan wujud dari kebutuhan pendanaan yakni jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja.

Berikut ini dipaparkan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif untuk anggaran tahun 2024, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Badan Pendapattann Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN								
Badan Pendapatan Daerah				Rp 198.216.417.956,00				Rp 210.029.928.157,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	98 %	Makassar	Rp 194.305.193.806,00	APBD		100 %	Rp 189.163.326.476,00
	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	98 %					100 %	
	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%					100%	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	Makassar	Rp 493.749.900,00	APBD		11 Dokumen	Rp 932.178.300,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	Makassar	Rp 143.340.800,00			2 Dokumen	Rp 225.999.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Makassar	Rp 119.961.000,00			1 Dokumen	Rp 214.609.300,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumeb perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (dokumen)	1 dokumen	Makassar	Rp 21.840.900,00			1 dokumen	Rp 137.134.400,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Makassar	Rp 43.210.900,00			1 Dokumen	Rp 144.015.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Makassar	Rp 109.846.500,00			1 Dokumen	Rp 114.719.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	Makassar	Rp 28.199.900,00			1 Laporan	Rp 53.599.900,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4 Laporan	Makassar	Rp 27.349.900,00			4 Laporan	Rp 42.100.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	Makassar	Rp 156.109.920.687,00	APBD		12 Laporan	Rp 160.862.062.684,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	484 orang/bulan	Makassar	Rp 155.719.622.587,00	484 orang/bulan		484 orang/bulan	Rp 159.976.959.884,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Makassar	Rp 11.130.000,00	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp 36.840.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Makassar	Rp 137.740.500,00	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp 400.646.700,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 Dokumen	Makassar	Rp 37.296.000,00	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp 91.386.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	Makassar	Rp 3.372.000,00	1 Laporan		1 Laporan	Rp 31.668.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	Makassar	Rp 99.848.300,00	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp 178.333.800,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	12 Laporan	Makassar	Rp 97.815.800,00	12 Laporan		12 Laporan	Rp 142.962.400,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Makassar	Rp 3.095.500,00	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp 3.265.900,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada BAPENDA	12 Laporan	Makassar	Rp 187.386.700,00	APBD		12 Laporan	Rp 347.258.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Makassar	Rp 12.614.800,00	2 Dokumen		2 Dokumen	Rp 12.719.400,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	Makassar	Rp 101.094.600,00	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp 152.999.800,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 Laporan	Makassar	Rp 6.000.000,00	1 Laporan		1 Laporan	Rp 6.000.000,00
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	25 Laporan	Makassar	Rp 5.024.000,00	25 Laporan		25 Laporan	Rp 5.052.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	Makassar	Rp 52.433.200,00	4 laporan		4 laporan	Rp 159.986.800,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	Makassar	Rp 5.800.000,00	4 laporan		4 laporan	Rp 6.000.000,00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Makassar	Rp 4.420.100,00	2 Dokumen		2 Dokumen	Rp 4.500.000,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan	Makassar	Rp 680.942.200,00	APBD		12 Laporan	Rp 785.364.200,00
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	12 Dokumen	Makassar	Rp 88.399.200,00	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp 302.442.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	1 Laporan	Makassar	Rp 77.753.300,00	1 Laporan		1 Laporan	Rp 117.826.700,00
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan data retribusi daerah	12 Laporan	Makassar	Rp 514.789.700,00	12 Laporan		12 Laporan	Rp 365.094.600,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Jumlah Dokumen Kepegawaian	100 %	Makassar	Rp 1.096.230.800,00	APBD		100 %	Rp 1.131.967.400,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	11 Unit	Makassar	Rp 275.206.800,00	11 Unit		11 Unit	Rp 241.956.200,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	484 Paket	Makassar	Rp -	484 Paket		484 Paket	Rp 102.410.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	Makassar	Rp 98.419.800,00	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp 207.728.200,00
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	Makassar	Rp 296.758.200,00	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp 244.978.000,00
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	20 Orang	Makassar	Rp -	20 Orang		20 Orang	Rp 6.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	Makassar	Rp 6.500.000,00	50 orang		50 orang	Rp 120.547.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	Makassar	Rp 3.000.000,00	50 orang		50 orang	Rp 6.400.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	Makassar	Rp 416.346.000,00	150 orang		150 orang	Rp 201.948.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	Makassar	Rp 5.390.994.000,00	APBD		100 %	Rp 4.365.430.850,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 Paket	Makassar	Rp 102.326.500,00	100 Paket		100 Paket	Rp 107.712.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Paket	Makassar	Rp 22.350.000,00	10 Paket		10 Paket	Rp 55.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	50 Paket	Makassar	Rp 1.297.575.000,00	50 Paket		50 Paket	Rp 336.424.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	20 Paket	Makassar	Rp 3.000.000.000,00	20 Paket		20 Paket	Rp 2.682.500.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	Makassar	Rp 497.526.000,00	12 Laporan		12 Laporan	Rp 376.101.550,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	Makassar	Rp 402.180.000,00	12 Laporan		12 Laporan	Rp 575.503.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Makassar	Rp -	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp 3.648.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Makassar	Rp 69.036.500,00	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp 228.542.300,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	Makassar	Rp 5.661.281.000,00	APBD		100 %	Rp 4.288.522.186,00
Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	10 paket	Makassar	Rp 329.271.000,00	10 paket		10 paket	Rp 221.220.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	400 Unit	Makassar	Rp 2.156.528.000,00	400 Unit		400 Unit	Rp 2.287.802.186,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit aset tak berwujud yang disediakan	1 Unit	Makassar	Rp -	1 Unit		1 Unit	Rp 50.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	11 unit	Makassar	Rp 340.370.000,00	11 unit		11 unit	Rp 1.297.500.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	Makassar	Rp 2.835.112.000,00	4 unit		4 unit	Rp 212.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	Makassar	Rp -	10 unit		10 unit	Rp 220.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 laporan	Makassar	Rp 16.634.947.113,00	APBD		32 laporan	Rp 10.121.181.224,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	Makassar	Rp 110.240.000,00	12 laporan		12 laporan	Rp 211.990.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	Makassar	Rp 8.985.793.141,00	4 Laporan		4 Laporan	Rp 6.718.524.376,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	Makassar	Rp 2.943.126.540,00	12 laporan		12 laporan	Rp 96.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	Makassar	Rp 4.595.787.432,00	4 laporan		4 laporan	Rp 3.094.666.848,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1099 Unit	Makassar	Rp 8.049.741.406,00	APBD		1099 Unit	Rp 6.329.361.632,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	155 Unit	Makassar	Rp 701.270.000,00	155 Unit		155 Unit	Rp 1.114.030.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	155 Unit	Makassar	Rp 599.573.950,00	155 Unit		155 Unit	Rp 654.840.000,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	165 Unit	Makassar	Rp 55.500.000,00	165 Unit		165 Unit	Rp 495.085.720,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	592 Unit	Makassar	Rp 492.630.000,00	592 Unit		592 Unit	Rp 55.500.000,00
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	6 Unit	Makassar	Rp 346.800.000,00	6 Unit		6 Unit	Rp 422.370.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	26 Unit	Makassar	Rp 5.853.967.456,00	26 Unit		26 Unit	Rp 3.587.535.912,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	100 %	Makassar	Rp 686.466.600,00	APBD		100 %	Rp 969.376.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan laporan hasil koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah bidang pendapatan daerah	100%	Makassar	Rp 413.707.100,00	APBD		100%	Rp 575.258.800,00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1 dokumen	Makassar	Rp 9.932.200,00	1 dokumen		1 dokumen	Rp 81.244.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	1 dokumen	Makassar	Rp 12.664.800,00	1 dokumen		1 dokumen	Rp 78.664.200,00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Makassar	Rp 9.176.800,00	1 dokumen		1 dokumen	Rp 22.135.700,00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	dokumen perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Makassar	Rp 10.283.700,00	1 dokumen		1 dokumen	Rp 24.788.900,00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Makassar	Rp 7.896.400,00	1 dokumen		1 dokumen	Rp 27.429.900,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	dokumen perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	Makassar	Rp 9.126.000,00	1 dokumen		1 dokumen	Rp 24.720.700,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	Makassar	Rp 64.706.000,00	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp 66.073.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	Makassar	Rp 78.029.500,00	2 produk hukum		2 produk hukum	Rp 38.395.100,00
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	1 dokumen	Makassar	Rp 211.891.700,00	1 laporan		1 laporan	Rp 211.805.900,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	cakupan hasil koordinasi dan pelaporan bidang pendapatan dengan bidang terkait	100%	Makassar	Rp 272.759.500,00	APBD		100%	Rp 394.117.200,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	12 laporan	Makassar	Rp 221.486.000,00	12 laporan		12 laporan	Rp 338.386.100,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	jumlah rancangan peraturan daerah tentang oertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi	12 Laporan	Makassar	Rp 51.273.500,00	12 Laporan		12 Laporan	Rp 55.731.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentasi Peningkatan PAD	5 %	Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 3.224.757.550,00	APBD		5 %	Rp 19.897.225.681,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan pendapatan daerah	12 Laporan	Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 3.224.757.550,00	APBD		12 Laporan	Rp 19.897.225.681,00
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	4 Dokumen	Makassar	Rp 666.682.300,00	4 Dokumen		4 Dokumen	Rp 757.418.200,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	4 Dokumen	Makassar	Rp 80.529.000,00	4 Dokumen		4 Dokumen	Rp 170.355.900,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	4 Laporan	Makassar	Rp 66.932.100,00	4 Laporan		4 Laporan	Rp 90.833.900,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Makassar I Selatan)	20 sarana dan prasarana	Makassar	Rp 569.532.850,00	20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	Rp 867.120.400,00
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Enrekang)	20 sarana dan prasarana	Enrekang		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Jeneponto)	20 sarana dan prasarana	Jeneponto		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Luwu Utara)	20 sarana dan prasarana	Luwu Utara		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Toraja Utara)	20 sarana dan prasarana	Toraja Utara		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Selayar)	20 sarana dan prasarana	Selayar		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Takalar)	20 sarana dan prasarana	Takalar		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Sinjai)	20 sarana dan prasarana	Sinjai		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Luwu)	20 sarana dan prasarana	Luwu		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Barru)	20 sarana dan prasarana	barru		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Bulukumba)	20 sarana dan prasarana	Bulukumba		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Tana Toraja)	20 sarana dan prasarana	Tana Toraja		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Luwu Timur)	20 sarana dan prasarana	Luwu Timur		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Soppeng)	20 sarana dan prasarana	Soppeng		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Sidrap)	20 sarana dan prasarana	Sidrap		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Wajo)	20 sarana dan prasarana	Wajo		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Bantaeng)	20 sarana dan prasarana	Bantaeng		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Gowa)	20 sarana dan prasarana	Gowa		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Pinrang)	20 sarana dan prasarana	Pinrang		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Pangkep)	20 sarana dan prasarana	Pangkep		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Bone)	20 sarana dan prasarana	Bone		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Palopo)	20 sarana dan prasarana	Palopo		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Pare-pare)	20 sarana dan prasarana	Pare-pare		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara (Unit)	30 sarana dan prasarana	Makassar		30 sarana dan prasarana		30 sarana dan prasarana	
	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Maros)	20 sarana dan prasarana	Maros		20 sarana dan prasarana		20 sarana dan prasarana	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Wajo)	12 Laporan	Wajo	Rp 204.355.600,00	12 Laporan		12 Laporan	Rp 361.960.400,00
	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Selayar)	12 Laporan	Selayar		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Takalar)	12 Laporan	Sinjai		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Makassar I Selatan)	12 Laporan	Makassar		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Makassar II Utara)	12 Laporan	Makassar		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Pare-pare)	12 Laporan	Pare-pare		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Bone)	12 Laporan	Bone		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Bantaeng)	12 Laporan	Bantaeng		12 Laporan		12 Laporan	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Gowa)	12 Laporan	Gowa		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Pinrang)	12 Laporan	Pinrang		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Maros)	12 Laporan	Maros		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Palopo)	12 Laporan	Palopo		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Pangkep)	12 Laporan	Pangkep		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Sidrap)	12 Laporan	Sidrap		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Tana Toraja)	12 Laporan	Tana Toraja		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Luwu Timur)	12 Laporan	Luwu Timur		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Soppeng)	12 Laporan	Soppeng		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Bulukumba)	12 Laporan	Bulukumba		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Luwu Utara)	12 Laporan	Luwu Utara		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (barru)	12 Laporan	barru		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Luwu)	12 Laporan	Luwu		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Sinjai)	12 Laporan	Sinjai		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Toraja Utara)	12 Laporan	Toraja Utara		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Enrekang)	12 Laporan	Enrekang		12 Laporan		12 Laporan	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Jeneponto)	12 Laporan	Jeneponto		12 Laporan		12 Laporan	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	12 Laporan	Bantaeng	Rp 247.765.900,00	12 Laporan		12 Laporan	Rp 359.576.300,00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Wajo	Rp 68.392.400,00	12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	Rp 138.117.900,00
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Selayar		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Sinjai		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Makassar		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Makassar		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Pare-pare		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Bone		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Bantaeng		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Gowa		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Pinrang		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Maros		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Palopo		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Pangkep		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Sidrap		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Tana Toraja		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Luwu Timur		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Soppeng		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Bulukumba		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Luwu Utara		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	barru		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Luwu		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Sinjai		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Toraja Utara		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Enrekang		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	Jeneponto		12 Dokumen Ketetapan		12 Dokumen Ketetapan	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 Laporan	Makassar	Rp 419.151.600,00	12 Laporan		12 Laporan	Rp 319.557.900,00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	12 Dokumen	Makassar	Rp 438.110.200,00	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp 100.660.800,00
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Makassar I Selatan)	4 Dokumen SSPD	Wajo	Rp 272.899.800,00	4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	Rp 1.140.891.100,00
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Makassar II Utara)	4 Dokumen SSPD	Selayar		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Pare-pare)	4 Dokumen SSPD	Sinjai		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Palopo)	4 Dokumen SSPD	Makassar		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Bone)	4 Dokumen SSPD	Makassar		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Wajo)	4 Dokumen SSPD	Pare-pare		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Bantaeng)	4 Dokumen SSPD	Bone		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Gowa)	4 Dokumen SSPD	Bantaeng		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Pinrang)	4 Dokumen SSPD	Gowa		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Maros)	4 Dokumen SSPD	Pinrang		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Pangkep)	4 Dokumen SSPD	Maros		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Sidrap)	4 Dokumen SSPD	Palopo		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Tana Toraja)	4 Dokumen SSPD	Pangkep		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Luwu Timur)	4 Dokumen SSPD	Sidrap		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Soppeng)	4 Dokumen SSPD	Tana Toraja		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Bulukumba)	4 Dokumen SSPD	Luwu Timur		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT Pendapatan Wilayah Barru (Unit)	4 Dokumen SSPD	Soppeng		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Luwu)	4 Dokumen SSPD	Bulukumba		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Sinjai)	4 Dokumen SSPD	Luwu Utara		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Takalar)	4 Dokumen SSPD	barru		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Selayar)	4 Dokumen SSPD	Luwu		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Toraja Utara)	4 Dokumen SSPD	Sinjai		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Luwu Utara)	4 Dokumen SSPD	Toraja Utara		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Jeneponto)	4 Dokumen SSPD	Enrekang		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang Pajak (Enrekang)	4 Dokumen SSPD	Jeneponto		4 Dokumen SSPD		4 Dokumen SSPD	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah dokumen keberatan yang telah diindikasikan	5 dokumen surat persetujuan/penolakan	Makassar	Rp 54.464.200,00	5 dokumen surat persetujuan/penolakan		5 dokumen surat persetujuan/penolakan	Rp 889.145.300,00
Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah	25 Laporan	Makassar	Rp 111.743.600,00	25 Laporan		25 Laporan	Rp 2.500.943.600,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	12 laporan	Makassar	Rp 24.198.000,00	12 laporan		12 laporan	Rp 12.200.643.981,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD).

Oleh sebab itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renja ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2024, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Rencana Kerja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan.

Untuk tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah merencanakan pelaksanaan 3 (tiga program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 79 (tujuh puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar **Rp 198.216.417.956,00** (seratus sembilan puluh delapan milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam rupiah).

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman bagi Bapenda dalam menyusun Rencana Anggaran (RKA) tahun 2024.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 yang dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. RENJA-PD Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-PD) Tahun 2024;
2. Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bagian lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan wajib menjadikan dokumen RENJA ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2024;
4. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan RENJA secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama tahun 2024.

Berdasarkan kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh Bidang, Sekretariat, dan UPT Pendapatan Lingkup Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk

menjadi bagian perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan;
2. Membentuk aparat profesional yang meliputi sikap yang integritas, disiplin, dan berkompetensi;
3. Memaksimalkan inovasi pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait dan kritik serta saran yang membangun demi terciptanya sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan

misi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 agar dapat mendukung keberhasilan terhadap program-program yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Makassar, 17 Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN



DR. H. REZA FAISAL SALEH, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I/ IV.b

Nip: 19820306 200012 1 001



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

JL. AP. PETTARANI NO. 1 MAKASSAR

TELEPON 1: +62411-873209 TELEPON 2: +62411-872164 FAX: +62411-854010

Find Us :



@bapendasulsel



@samsatsulsel



@bapendasulsel



<https://bapendasulsel.web.id/>

